



Analisis perspektif masyarakat pada program jaminan kesehatan nasional di wilayah Teluk Mengkudu

Fani Dwi Yanti¹, Susilawati²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

¹fanidy99@gmail.com, ²susilawati@uinsu.ac.id

Info Artikel :

Diterima :

5 Februari 2023

Disetujui :

15 Februari 2023

Dipublikasikan :

25 Februari 2023

ABSTRAK

JKN yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari system jaminan sosial nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory). Hal ini berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kepercayaan masyarakat di wilayah TelukMengkudu terhadap program JKN. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui pendekatan fenomenologi serta observasi dan kusioner. Hasil penelitian masyarakat di wilayah Teluk Mengkudu percaya dengan program JKN-KIS sebesar 92% ini menunjukkan sigfinikasi yang sangat baik, selanjutnya sebesar 89% masyarakat di wilayah Teluk Mengkudu percaya dan terbukti bahwa jaminan Kesehatan ini sangat baik dan program ini dapat mencakup semua masyarakat menjadikan keringan bagi mereka untuk berobat pada pelayanan Kesehatan terdekat. Namun ada sebesar 52% tidak percaya bahwasannya program JKN ini bisa menjamin semua pembiayaan Kesehatan. Kurangnya sosialisasi menjadi alasan mereka kurang percaya terhadap pembiayaan yang ditanggung oleh JKN. Program JKN pada wilayah Teluk Mengkudu sudah berjalan cukup baik, namun masih terdapat kurangnya pemahaman masyarakat tentang pembiayaan dan kegunaan terhadap JKN.

Kata kunci: Program JKN, JKN-KIS, Perspektif masyarakat, Asuransi

ABSTRACT

The JKN developed in Indonesia is part of the national social security system, which is organized using a mandatory social health insurance mechanism. The goal of this study was to determine the public's trust in the JKN program in the TelukMengkudu region. This research method uses a descriptive qualitative approach through a phenomenological approach as well as observation and a questionnaire. The research results show that 92% of the people in the Mengkudu Bay area believe in the JKN-KIS program, which shows a very good significance. Then, 89% of the people in the Mengkudu Bay area believe, and it is proven that health insurance is very good, and this program can cover the whole community, making it easier for them to seek treatment at the nearest health service. However, 52% do not believe that the JKN program can guarantee all health financing. The lack of socialization is the reason they don't trust the financing covered by JKN. The JKN program in the Mengkudu Bay area has been running quite well, but there is still a lack of public understanding about the financing and use of JKN.

Keywords : Program JKN, JKN-KIS, Community perspective, Insurance



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menjamin kesehatan masyarakat melalui asuransi. Pemerintah mengupayakan perlindungan sosial untuk menjamin kesehatan masyarakat secara komprehensif, murah, terjangkau, dan bermutu, melalui sistem rujukan yang berjalan baik (Primasari, 2015). JKN sudah dimulai per 1 Januari 2014. Jaminan kesehatan ini merupakan bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak (Ardinata, 2020). JKN yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari system jaminan sosial nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) (Amira, 2015).

Hal ini berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak.

Berdasarkan data profil kesehatan kab/kota di provinsi Sumatera Utara tahun 2019, Cakupan peserta PBI per kabupaten/kota menunjukkan bahwa Kabupaten Nias Barat merupakan kabupaten yang penduduknya menjadi peserta PBI terbesar di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 yaitu Kabupaten Pakpak Bharat sebesar 87,42%, dan Kabupaten Nias sebesar 85,05%. Sedangkan kabupaten dengan jumlah penduduk paling sedikit menjadi peserta PBI adalah Kabupaten Batu Bara dengan persentase sebesar 15,97%. Dan untuk Serdang Bedagai sebesar 44,11%. Cakupan peserta Non PBI di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 sebesar 31,61%. Sedangkan cakupan peserta JKN non PBI menurut kabupaten/kota menunjukkan bahwa daerah dengan mayoritas kepesertaan JKN non PBI merupakan Kota Binjai sebesar 55,03%, diikuti Kota Pematangsiantar sebesar 53,29% dan Kota Medan sebesar 51,49% sedangkan untuk Serdang Bedagai sebesar 28,23%. Peserta jaminan kesehatan Non PBI ini terdiri dari Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau Mandiri, dan Bukan Pekerja.

Dengan terbentuknya Program Jaminan Kesehatan – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sangat berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Program ini membuka akses yang besar untuk masyarakat mendapatkan jaminan Kesehatan (Rahami, 2018). Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menjelaskan Landasan dan dasar hukum dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.71 Tahun 2013 telah mengatur kebijakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Keikutsertaan masyarakat dalam JKN-KIS sangatlah penting (Sabila, 2022). Karena penyelenggaraan Program JKN-KIS berlandaskan asas gotong royong yang berkeadilan bagi seluruh penduduk Indonesia sesuai dengan kultur budaya bangsa (Estera, 2018). Terdapat mekanisme saling membantu atau meringankan biaya kesehatan perorang, dimana peserta yang sehat akan membantu peserta yang sakit, yang muda mensubsidi yang sudah tua, sehingga dapat mewujudkan Indonesia sehat. JKN harus dapat memberikan keadilan dalam pembiayaan kesehatan sehingga terjadi *cross* subsidi antara penduduk dan antar daerah (Katiandagho, 2018).

Peserta JKN-KIS terbagi menjadi 2 golongan. Yaitu peserta penerima bantuan iuran (PBI) dan peserta bukan penerima bantuan iuran (non PBI). Peserta penerima bantuan adalah peserta JKN-KIS yang kurang mampu, sehingga iurannya ditanggung oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Sedangkan untuk non PBI iurannya dibayar sendiri oleh lembaga kerja maupun individu.

Hasil penelitian Yun Fitrahyati Laturrahmi, Sinta Swastikawara, dan Nilam Wardasari (2019) menunjukkan bahwa masyarakat Desa Boro, Kabupaten Tulungagung terjebak pada informasi hoax terkait JKN-KIS yang membuat mereka enggan untuk ikut serta dalam kepesertaan JKN-KIS, utamanya Non PBI. Masyarakat lebih tertarik untuk mendapatkan JKN-KIS PBI karena menilai pengeluaran tiap bulan untuk JKN-KIS Non PBI menjadi percuma jika tidak digunakan. Mitos atas informasi hoax ini semakin besar karena rendahnya pemberian informasi kepada masyarakat. Rendahnya health literacy menjadi permasalahan kunci dari adanya misinformasi yang tercipta.

Hasil penelitian Laila Dwi Darmayanti dan Bambang Budi Raharjo (2020) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan (RP=4,8; 95% CI=2,1-10,7), tingkat pengetahuan (RP=1,6; 95% CI=1,1-2,2), pekerjaan (RP=1,8; 95% CI=1,2-2,7), tingkat pendapatan (RP=2,2; 95% CI=1,6-2,9), informasi (RP=2,6; 95% CI=1,5-4,5), dan dukungan sosial (RP=1,9; 95% CI=1,5-2,7) berhubungan dengan keikutsertaan masyarakat dalam JKN mandiri.

Hasil penelitian Harianti (2017) menunjukkan bahwa dengan adanya JKN-KIS memiliki dampak negatif dan positif. Dampak positif yang dirasakan para pengguna JKN, yaitu biaya pengobatan terjangkau, mempunyai asuransi, dan iuran bulanan terjangkau. Sedangkan dampak negatif yang dirasakan adalah tentang lamanya daftar tunggu rawat inap di rumah sakit, adanya keterbatasan obat, dan harus mengikuti aturan rujukan.

Terdapatnya isu-isu masyarakat yang ketika ingin berobat ke pelayanan menggunakan JKN-KIS mendapatkan pelayanan yang kurang baik. Sehingga banyak masyarakat yang kurang mempercayai program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) ini. Sehingga penulis ingin melakukan penelitian tentang kepercayaan masyarakat di wilayah Teluk Mengkudu yang bertujuan agar dapat dilaksanakan evaluasi terhadap program JKN pada wilayah tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kepercayaan masyarakat di wilayah Teluk Mengkudu terhadap program JKN.

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2019:2) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis penelitian kualitatif deskriptif, Menurut Sugiyono (2019:296) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Berikut ini merupakan beberapa teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2019) Teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi Menurut Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2019:321) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. dengan pendekatan fenomenologis melalui wawancara kepada masyarakat dan observasi serta melalui kuesioner sebagai penambahan data untuk mengetahui kepercayaan masyarakat wilayah teluk mengkudu. Dengan jumlah respondens sebanyak 100 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepercayaan masyarakat terhadap JKN sangatlah berdampak pada program-program JKN dan pelayanan Kesehatan, Banyaknya masyarakat yang kurang percaya terhadap JKN akan mengurangi masyarakat untuk mengunjungi fasilitas Kesehatan yang disediakan.

Jenis Kepesertaan JKN

No	Jenis Kepesertaan JKN	Jumlah	%
1	Mandiri	24	24%
2	Pemerintah	64	64%
3	Tidak memiliki Jkn	12	12%

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang menggunakan jenis kepesertaan JKN-KIS atau PBI sebanyak 64%. Hasil ini menunjukkan pemerintah wilayah Teluk Mengkudu telah cukup baik dalam program JKN-KIS.

Dari hasil penelitian yang kami lakukan melalui respondens dapat kami simpulkan bahwasannya masyarakat di wilayah Teluk Mengkudu percaya dengan program JKN-KIS sebesar 92% ini menunjukkan sigfinikasi yang sangat baik, selanjutnya sebesar 89% masyarakat diwilayah Teluk Mengkudu percaya dan terbukti bahwa jaminan Kesehatan ini sangat baik dan program ini dapat mencakup semua masyarakat menjadikan keringan bagi mereka untuk berobat pada pelayanan Kesehatan terdekat. Namun ada sebesar 52% tidak percaya bahwasannya program JKN ini bisa menjamin semua pembiayaan Kesehatan. Kurangnya sosialisasi menjadi alasan mereka kurang percaya terhadap pembiayaan yang ditanggung oleh JKN.

Dengan terbentuknya Program Jaminan Kesehatan – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sangat berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Program ini membuka akses yang besar untuk masyarakat mendapatkan jaminan Kesehatan. Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menjelaskan Landasan dan dasar hukum dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.71 Tahun 2013 telah mengatur kebijakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Keikutsertaan masyarakat dalam JKN-KIS sangatlah penting. Karena penyelenggaraan Program JKN-KIS berlandaskan asas gotong royong yang berkeadilan bagi seluruh penduduk Indonesia sesuai dengan kultur budaya bangsa. Terdapat mekanisme saling membantu atau meringankan biaya kesehatan perorang, dimana peserta yang sehat akan membantu peserta yang sakit, yang muda mensubsidi yang sudah tua, sehingga dapat mewujudkan Indonesia sehat.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang kami lakukan melalui respondens dapat kami simpulkan bahwasannya masyarakat di wilayah Teluk Mengkudu percaya dengan program JKN-KIS sebesar 92%

ini menunjukkan sigfinikasi yang sangat baik, selanjutnya sebesar 89% masyarakat diwilayah Teluk Mengkudu percaya dan terbukti bahwa jaminan Kesehatan ini sangat baik dan program ini dapat mencakup semua masyarakat menjadikan keringan bagi mereka untuk berobat pada pelayanan Kesehatan terdekat. Namun ada sebesar 52% tidak percaya bahwasannya program JKN ini bisa menjamin semua pembiayaan Kesehatan. Kurangnya sosialisasi menjadi alasan mereka kurang percaya terhadap pembiayaan yang ditanggung oleh JKN. Progran JKN pada wilayah Teluk Mengkudu sudah berjalan cukup baik, namun masih terdapat kurangnya pemahaman masyarakat tentang pembiayaan dan kegunaan terhadap JKN.

DAFTAR PUSTAKA

- Amira, A. Y. (2015). Evaluasi Pelaksanaan Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional dari Aspek Struktur dan Interaksi Sosialisasi Pada Bulan Januari-Maret 2014 di Puskesmas Ngesrep Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 3(1), 8.
- Ardinata, M. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 11(2), 319-332.
- Darmayanti, L. D., & Raharjo, B. B. (2020). Keikutsertaan masyarakat dalam jaminan kesehatan nasional mandiri. *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*, 4(Special 4), 824-834.
- Estera, S. (2018). Implementasi Pelayanan Publik Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 6(2).
- Katiandagho, D. (2018). Perspektif Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) Dalam Pandangan Masyarakat di Kecamatan Tikala Kota Manado. *Jurnal Sehat Mandiri*, 13(2), 56-70.
- Laturrakhmi, Y. F., Swastikawara, S., & Wardasari, N. (2020). Analisis perilaku masyarakat pedesaan terhadap asuransi kesehatan nasional dalam perspektif komunikasi kesehatan. *Komuniti: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*, 12(2), 87-100.
- Primasari, K. L. (2015). Analisis Sistem Rujukan Jaminan Kesehatan Nasional RSUD. Dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak. *Jurnal Administrasi Rumah Sakit Indonesia*, 1(2).
- Raharni, R., Supardi, S., & Sari, I. D. (2018). Kemandirian dan Ketersediaan Obat Era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Kebijakan, Harga, dan Produksi Obat. *Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*, 28(4), 219-228.
- Harianti, Retno Dwi. (2017). *Analisis Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) Di Kota Semarang*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
- Sabila, Z. S., Triska, A., Widaningsih, W., & Sumiati, I. (2022). Analisis Pelayanan Jkn-Kis Di Rsud Dr. Murjani Sampit. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 6(1), 400-403.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta